

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PEREKONOMIAN PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**RIRIN ROHAYATI**

**NIM. 84672/2007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2013**

**Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi**

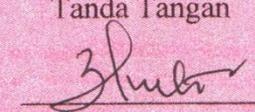
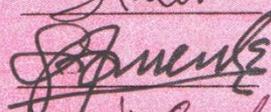
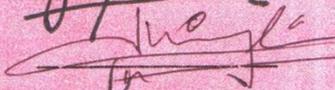
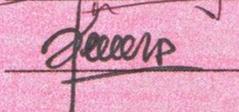
***Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Universitas Negeri Padang***

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perekonomian Propinsi-propinsi  
di Indonesia**

Nama : Ririn Rohayati  
TM/NIM : 2007/84672  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2013

**Tim Penguji**

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	
2. Sekretaris	: Drs. Akhirmen, M.Si	
3. Anggota	: Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S	
4. Anggota	: Dewi Zaini Putri, S.E, M.M	

## ABSTRAK

**Ririn Rohayati (2007/84672) : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) Pengaruh konsumsi terhadap produk domestik regional bruto, (2) Pengaruh investasi terhadap produk domestik regional bruto, (3) Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik regional bruto, (4) Pengaruh ekspor netto terhadap produk domestik regional bruto, (5) Pengaruh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto propinsi-propinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data pooling atau panel yaitu kombinasi dari 33 Propinsi di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2010. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik karena model yang digunakan adalah *random effect*. Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan (1) Analisis regresi data panel, (2) Uji t, dan (3) Uji F dengan taraf nyata 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsumsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000 < \alpha = 0,05$ ) dengan tingkat pengaruh sebesar 1.0537 satuan, (2) Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000 < \alpha = 0,05$ ) dengan tingkat pengaruh sebesar 0.8961 satuan, (3) Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000 > \alpha = 0,05$ ) dengan tingkat pengaruh sebesar 1.3415 satuan, (4) Ekspor Netto berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000 < \alpha = 0,05$ ) dengan tingkat pengaruh sebesar 0.9935 satuan, (5) Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000 < \alpha = 0,05$ ). Kontribusi secara bersama-sama dari variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,9952 persen dan 0,48 persen adalah variabel yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia agar meningkatkan produksi guna menambah tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan produksi juga dapat meningkatkan ekspor netto propinsi-propinsi di Indonesia. Selain itu peningkatan penanaman investasi dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Provinsi-provinsi di Indonesia”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Akhirmen, M.Si, Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S, Ibu Dra.Hj.Mirna Tanjung, M.S dan Ibu Dewi Zaini Putri, S.E, M.M selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta beserta kedua kakak terkasih yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
9. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Maret 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Pembatasan Masalah .....	17
D. Rumusan Masalah.....	18
E. Tujuan Penelitian .....	18
F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
<b>DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	20
1. Konsep Perekonomian Terbuka.....	20
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian.....	24
B. Temuan Penelitian Sejenis.....	40
C. Kerangka Konseptual.....	41
D. Hipotesis .....	44
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46

D. Variabel Penelitian.....	47
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	47
F. Defenisi Operasional.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
1. Analisis Deskriptif.....	49
2. Analisis Induktif.....	51
a. Model Regresi Panel ( <i>Pooled Analysis</i> ).....	53
b. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	57
c. Pengujian Hipotesis.....	58
1) Uji t.....	58
2) Uji F.....	59

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	60
a. Keadaan Geografis Indonesia.....	60
b. Jumlah Penduduk Indonesia.....	61
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	63
a. Perkembangan Konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia.....	64
b. Perkembangan Investasi Propinsi-propinsi di Indonesia.....	66
c. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Propinsi- propinsi di Indonesia.....	69
d. Perkembangan Ekspor Netto Propinsi-propinsi di Indonesia.....	72
3. Analisis Induktif.....	74
a. Analisis Model Regresi Panel.....	76
b. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	81
c. Pengujian Hipotesis.....	82
1) Uji t.....	82
2) Uji F.....	84

B. Pembahasan .....	85
1. Pengaruh Konsumsi Terhadap Perekonomian Propinsi- propinsi di Indonesia .....	85
2. Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Propinsi- propinsi di Indonesia .....	87
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia.....	89
4. Pengaruh Ekspor Netto Terhadap Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia.....	92
5. Pengaruh Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Netto Terhadap Perekonomian Propinsi- propinsi di Indonesia .....	94

## **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	96
B. Saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku .....	6
2	Perkembangan Konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	10
3	Perkembangan Investasi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	11
4	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku .....	13
5	Perkembangan Ekspor Netto Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	15
6	Jumlah penduduk Indonesia tahun 2007-2010 .....	63
7	Perkembangan Konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	65
8	Perkembangan Investasi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	68
9	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku .....	71
10	Perkembangan Ekspor Netto Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	73
11	Hasil Uji Chow Test .....	74
12	Hasil Uji Hausman .....	75
13	Analisis Model Regresi Panel Regresi Panel .....	78

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1 Fungsi Konsumsi.....	25
2 Fungsi Konsumsi dan Keseimbangan Agregat .....	27
3 Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam Perekonomian Terbuka.....	38
4 Pengaruh Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor Netto terhadap Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Diolah .....	101
2. Hasil Uji Regresi Data Panel .....	110
Hasil Uji Chow Test .....	112
Hasil uji Hausman Test.....	113

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam perekonomian terbuka terdapat kegiatan ekonomi ekspor dan impor, sehingga komponen variabel ekonomi suatu negara menjadi empat komponen. Komponen variabel tersebut diantaranya adalah konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto.

Variabel konsumsi memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Konsumsi dapat menggambarkan kecenderungan masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga secara agregat. Apabila kurun waktu tertentu konsumsi meningkat maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik dan mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Konsumsi yang berfungsi untuk menyerap komoditi yang telah diproduksi oleh sektor riil. Artinya kemampuan daya beli masyarakat sangat diperlukan oleh perekonomian setiap negara agar penawaran sesuai dengan permintaan didalam perekonomian. Dengan begitu tidak akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) ataupun kelebihan penawaran (*excess supply*) didalam perekonomian.

Investasi juga dapat dikatakan sebagai motor penggerak pembangunan setiap negara. Seperti halnya pendapatan yang diterima setiap orang maka tentu tidak seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi. Uang yang diterima juga di alokasikan untuk berinvestasi. Investasi memiliki hubungan dengan pendapatan dan suku bunga. Maka apabila pendapatan meningkat investasi juga meningkat. Dan sebaliknya, jika pendapatan menurun maka investasi akan menurun. Hubungan ini tercipta otomatis didalam perekonomian.

Dalam melakukan investasi, maka Indonesia sangat memerlukan modal. Modal tersebut dapat diperoleh dari pendapatan negara, diantaranya dari tabungan nasional dan dari pendapatan pajak. Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya setiap negara akan melakukan pengeluaran yang disebut pengeluaran pemerintah untuk membiayai setiap program yang dicanangkan. Pengeluaran pemerintah untuk komponen ketiga dari permintaan barang dan jasa yang mencakup pembelian senjata, peluru dan jasa pegawai pemerintah. Di suatu daerah, pengeluaran pemerintah dapat berupa pembelian buku-buku untuk perpustakaan, membangun gedung-gedung dan mempekerjakan para guru.

Pengeluaran pemerintah tidak dapat terus dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Untuk mencari sumber pembangunan lainnya, Negara Indonesia telah menganut sistem ekonomi terbuka. Dengan sistem ekonomi terbuka ini Indonesia dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan negaranya dalam wujud kerjasama internasional. Wujud kerjasama tersebut berupa ekspor dan impor. Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor suatu negara juga merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui neraca pembayaran untuk meningkatkan nilai jual devisa domestik. Ekspor dilakukan apabila terjadi kelebihan produksi di atas kebutuhan maksimal.

Peningkatan ekspor juga penting untuk memperbaiki neraca pembayaran sekaligus untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah.

Indonesia telah mengikuti proses pembangunan yang menggantungkan diri pada ekspor sebagai penggerak. Hal ini dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atas suatu komoditi tertentu dimana pemerintah ataupun swasta tidak dapat menyediakannya. Selain itu impor juga dilakukan bila terdapat bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri dalam proses produksi tertentu. Dalam hal ini impor akan mengurangi pendapatan negara. Dengan berkurangnya pendapatan negara akan menyebabkan proses pembangunan menjadi lambat.

Perekonomian terbuka yang dilakukan suatu negara sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan tidak terlepas dari perdagangan internasional. Hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Bahkan Amerika dan Jepang, dua Negara yang ekonominya kuat dan maju, mengimpor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Amerika memenuhi sebagian besar kebutuhan minyak sawitnya dengan mengimpor dari Indonesia. Sementara itu Jepang memenuhi gas alam cair (*liquid natural gas*) dengan mengimpor dari Indonesia. Selanjutnya, melalui penerimaan hasil ekspor minyak sawit dan gas alam cair tersebut, Indonesia dapat mengimpor barang-barang modal untuk keperluan pembangunan industrinya (Ritonga, 2006:84).

Disisi lain, keterbukaan suatu perekonomian tidak selalu menguntungkan. Impor yang berlebih-lebihan dapat mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri karena hal tersebut berarti konsumen menggunakan barang luar negeri dan tidak menggunakan barang buatan dalam negeri. Lebih banyak pengangguran akan berlaku. Implikasi berikutnya dari keadaan ini adalah modal dalam negeri akan

mengalir ke luar negeri. Maka ketidakseimbangan di antara aliran uang dari dalam ke luar negeri akan berlaku.

Selain itu, melihat kenyataan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia terhadap ekonomi global maka menyebabkan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi tidak pasti. Dikatakan kondisi tidak pasti karena suatu saat pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan hebatnya dan bisa saja malah terpuruk dalam jurang paling dalam. Akibat dari fluktuasi ekonomi global yang sangat labil terhadap keseimbangan yang terjadi antara sisi penawaran dan sisi permintaan dalam wujud pasar secara keseluruhan. Oleh karena adanya kondisi ketidakpastian dalam ekonomi global, maka beberapa komponen yang berpengaruh terhadap perekonomian bisa saja kurang berpengaruh.

Data beberapa propinsi di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian antara besarnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto terhadap PDRB propinsi-propinsi di Indonesia. Artinya, ketika sebuah propinsi mengalami peningkatan (misalnya konsumsi), namun PDRB provinsi tersebut tidak cukup tinggi dibandingkan dengan PDRB propinsi yang konsumsinya rendah. Sebagai contoh pada tahun 2010 propinsi DI Yogyakarta memiliki jumlah konsumsi sebesar Rp9.881.632,38 juta namun memiliki jumlah PDRB sebesar Rp 21.044.041,54 juta. Sementara propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah konsumsi rumah tangga di atas propinsi DIY yaitu Rp 10.528.600,27 juta justru memiliki jumlah PDRB di bawah propinsi DIY yaitu sebesar RP 12.531.629,66 juta.

Propinsi Papua yang memiliki jumlah pengeluaran pemerintah sebesar Rp 4.552.240,20 juta memiliki PDRB sebesar Rp 22.620.295,88 juta. Sementara propinsi Kepulauan Riau yang memiliki jumlah pengeluaran pemerintah di bawah

propinsi Papua justru memiliki PDRB di atas propinsi Papua yaitu sebesar Rp 41.083.258,84 juta.

Begitu juga yang terjadi terhadap investasi dan ekspor neto pada tahun 2010. propinsi Gorontalo yang memiliki investasi sebesar Rp 1.022.732,34 juta memiliki PDRB sebesar Rp 2.917.491,23 juta. Sementara propinsi Sulawesi Barat yang memiliki jumlah investasi dibawah propinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp 559.329,07 juta justru memiliki jumlah PDRB diatas propinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp 4.744.309,49 juta.

Jumlah ekspor neto yang dimiliki propinsi Jawa Timur sebesar Rp - 327.737,74 juta dapat menghasilkan PDRB sebesar Rp 342.280.765,51 juta. Ekspor netto yang negatif disebabkan oleh besarnya jumlah impor yang melebihi jumlah ekspor. Sementara propinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah ekspor neto di atas propinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 4.043.810,00 juta menghasilkan PDRB di bawah propinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 63.735.999,00 juta.

Berdasarkan fenomena di atas, terlihat ketidaksesuaian antara konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto terhadap jumlah PDRB beberapa propinsi di Indonesia. Ketika masing-masing jumlah konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto tinggi, PDRB justru menunjukkan pada jumlah yang rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika masing-masing jumlah konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto rendah, PDRB justru menunjukkan pada jumlah yang tinggi.

Pada Tabel 1 disajikan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi-propinsi di Indonesia tahun 2009-2010.

**Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku**

No	Propinsi	Tahun 2009 (Juta Rp)	Tahun 2010 (Juta Rp)	Laju Pertum- buhan (%)	Rata-rata
1	Aceh	71.694.544,56	77.505.598,25	8,11	74.600.071,41
2	Sumatera Utara	236.353.615,83	275.700.207,28	16,65	256.026.911,56
3	Sumatera Barat	76.752.937,72	87.221.254,05	13,64	81.987.095,89
4	Riau	297.173.028,31	342.691.448,53	15,32	319.932.238,42
5	Jambi	44.127.005,65	53.816.693,03	21,96	48.971.849,34
6	Sumatera Selatan	137.331.848,00	157.772.133,00	14,88	147.551.990,50
7	Bengkulu	15.920.849,25	18.036.964,48	13,29	16.978.906,87
8	Lampung	87.842.779,59	107.277.261,62	22,12	97.560.020,61
9	Kepulauan Bangka Belitung	22.982.017,78	25.705.625,51	11,85	24.343.821,65
10	Kepulauan Riau	63.892.937,49	71.614.514,31	12,09	67.753.725,90
11	DKI Jakarta	757.696.594,05	862.158.910,75	13,79	809.927.752,40
12	Jawa Barat	689.841.314,34	770.660.505,05	11,72	730.250.909,70
13	Jawa Tengah	397.903.943,76	444.396.468,19	11,68	421.150.205,98
14	DI Yogyakarta	41.407.049,50	45.625.589,50	10,19	43.516.319,50
15	Jawa Timur	686.847.557,72	778.455.772,46	13,34	732.651.665,09
16	Banten	133.048.007,12	148.976.218,93	11,97	141.012.113,03
17	Bali	57.579.254,27	64.567.004,85	12,14	61.073.129,56
18	Kalimantan Barat	54.234.103,52	60.475.251,81	11,51	57.354.677,67
19	Kalimantan Tengah	37.114.185,67	42.567.204,79	14,69	39.840.695,23
20	Kalimantan Selatan	51.460.175,70	58.541.818,60	13,76	55.000.997,15
21	Kalimantan Timur	284.966.500,80	320.958.565,11	12,63	302.962.532,96
22	Sulawesi Utara	33.033.609,80	36.834.792,63	11,51	34.934.201,22
23	Sulawesi Tengah	31.752.009,17	36.124.486,32	13,77	33.938.247,75
24	Sulawesi Selatan	99.954.589,75	117.830.270,49	17,88	108.892.430,12
25	Sulawesi Tenggara	25.655.940,70	28.369.052,73	10,57	27.012.496,72
26	Gorontalo	7.069.055,26	8.056.514,10	13,97	7.562.784,68
27	Sulawesi Barat	9.403.378,61	10.986.624,74	16,84	10.195.001,68
28	Nusa Tenggara Barat	43.985.030,56	49.362.706,42	12,23	46.673.868,49
29	Nusa Tenggara Timur	24.179.412,16	27.711.246,07	14,61	25.945.329,12
30	Maluku	7.069.642,15	8.084.807,44	14,36	7.577.224,80
31	Maluku Utara	4.690.567,72	5.387.443,93	14,86	5.039.005,83
32	Papua Barat	17.214.137,63	22.527.364,81	30,87	19.870.751,22
33	Papua	77.728.564,53	89.451.248,76	15,08	83.589.906,65
<b>Rata-rata</b>		140.239.581,47	159.256.108,14	14,36	149.747.844,81

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar 2012

Tabel 1 menunjukkan bahwa sumbangan PDRB propinsi-propinsi terhadap PDRB Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh persebaran letak propinsi-propinsi yang tersebar di berbagai pulau, sehingga menimbulkan PDRB berbagai propinsi menjadi berfluktuasi. Selain itu juga disebabkan oleh sumber pendapatan yang berbeda-beda. Pengeluaran Pemerintah yang berfluktuasi juga dapat menjadi salah satu sebab berfluktuasinya PDRB propinsi-propinsi di Indonesia.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa propinsi Papua Barat memiliki laju pertumbuhan PDRB yang paling tinggi dibandingkan propinsi lainnya yaitu sebesar 30,87% dengan rata-rata laju pertumbuhan pada tahun yang sama sebesar 14,36%. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan di Papua Barat berada di atas rata-rata laju pertumbuhan secara keseluruhan pada tahun yang sama. Hal ini kemungkinan disebabkan propinsi Papua Barat memiliki sumber pendapatan yang baik pada tahun tersebut, sehingga PDRB propinsi Papua Barat meningkat.

Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa propinsi Aceh memiliki laju pertumbuhan PDRB terkecil yaitu sebesar 8,11%, dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 14,36%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh investasi di provinsi Aceh yang cenderung sedikit sehingga pertumbuhan ekonomi propinsi Aceh melambat.

Tabel 1 juga memperlihatkan rata-rata PDRB tertinggi terdapat di propinsi DKI Jakarta yaitu Rp 809.927.752,40 juta yang berada di atas rata-rata PDRB secara keseluruhan yaitu Rp 149.747.844,81 juta. Hal ini kemungkinan disebabkan propinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Dimana seluruh pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan dan jasa dilakukan di DKI Jakarta. Selanjutnya diikuti oleh propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan propinsi Maluku Utara memiliki rata-rata PDRB terendah yaitu sebesar Rp 5.039.005,83

juta. Hal ini kemungkinan dikarenakan pusat kegiatan ekonomi yang tidak terlalu berkembang sehingga PDRB propinsi Maluku Utara melambat.

Dalam membentuk besarnya Produk Domestik Regional Bruto dalam perekonomian maka diperlukan adanya konsumsi rumah tangga. Konsumsi merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi besarnya Produk Domestik Regional Bruto propinsi-propinsi di Indonesia. Pada Tabel 2 disajikan data konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia tahun 2009-2010. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia mengalami fluktuasi. Berfluktuasinya konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh pendapatan disetiap propinsi-propinsi berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dimana pendapatan yang tinggi akan menyebabkan konsumsi yang tinggi pula. Begitu pula sebaliknya semakin rendah pendapatan maka akan menyebabkan konsumsi menjadi rendah.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa propinsi Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan konsumsi tertinggi yaitu sebesar 18,86% yang berada di atas rata-rata laju pertumbuhannya yaitu sebesar 6,81%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena propinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang dekat dengan luar negeri yang banyak mengimpor barang ke propinsi Kepulauan Riau dengan harga yang relatif murah dengan kualitas yang bagus, sehingga memicu penduduk provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan konsumsi. Selain itu juga didukung oleh pendapatan yang tergolong tinggi.

Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa laju pertumbuhan konsumsi terendah terdapat di propinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,73% dengan rata-rata laju pertumbuhan konsumsi sebesar 6,81%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009, sehingga menyebabkan

persediaan barang dan jasa menjadi berkurang, akibatnya konsumsi cenderung berada dibawah rata-rata.

Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa rata-rata konsumsi tertinggi terdapat di propinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp 236.584.175,14 juta yang berada di atas rata-rata konsumsi secara keseluruhan yaitu Rp 36.368.871,8 juta. Hal ini kemungkinan dikarenakan propinsi Jawa Timur memiliki pendapatan yang tergolong tinggi. Konsumsi masyarakat dapat meningkat seiring dengan pendapatan yang tinggi. provinsi Gorontalo berada pada posisi rata-rata konsumsi terendah yaitu sebesar Rp 2.107.905,67 juta. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah pendapatan di propinsi Gorontalo yang tergolong rendah sehingga dapat mengurangi jumlah konsumsi di propinsi tersebut menjadi sedikit.

Konsumsi sangat berbeda-beda pada masing-masing propinsi di Indonesia, akibatnya PDRB yang terbentuk juga berbeda-beda di setiap propinsi-propinsi tersebut. Komponen pembentuk PDRB selain konsumsi yaitu investasi. Berikut data konsumsi propinsi-propinsi di Indonesia disajikan pada Tabel 2, kemudian diteruskan dengan data investasi propinsi-propinsi di Indonesia yang akan ditampilkan pada Tabel 3.

**Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku**

No	Propinsi	Tahun 2009 (Juta Rp)	Tahun 2010 (Juta Rp)	Laju Pertum- buhan (%)	Rata-rata
1	Aceh	12.216.975,19	12.825.186,11	4,98	12.521.080,65
2	Sumatera Utara	68.475.416,56	74.120.391,29	8,24	71.297.903,93
3	Sumatera Barat	18.915.569,95	19.054.148,75	0,73	18.984.859,35
4	Riau	33.407.912,97	35.891.518,13	7,43	34.649.715,55
5	Jambi	11.727.158,48	12.364.416,38	5,43	12.045.787,43
6	Sumatera Selatan	36.849.083,53	39.073.745,00	6,04	37.961.414,27
7	Bengkulu	4.991.074,54	5.390.332,08	8,00	5.190.703,31
8	Lampung	20.666.298,71	21.634.109,00	4,68	21.150.203,86
9	Kepulauan Bangka Belitung	5.028.998,23	5.372.006,05	6,82	5.200.502,14
10	Kepulauan Riau	19.829.800,84	23.569.785,56	18,86	21.699.793,20
11	DKI Jakarta	193.611.285,97	205.877.104,68	6,34	199.744.195,33
12	Jawa Barat	195.064.726,15	203.968.382,74	4,56	199.516.554,45
13	Jawa Tengah	113.231.168,43	120.240.863,37	6,19	116.736.015,90
14	DI Yogyakarta	9.211.149,17	9.881.632,38	7,28	9.546.390,78
15	Jawa Timur	229.341.156,16	243.827.194,11	6,32	236.584.175,14
16	Banten	27.569.133,89	29.049.444,92	5,37	28.309.289,41
17	Bali	15.138.248,79	16.635.190,30	9,89	15.886.719,55
18	Kalimantan Barat	15.267.040,07	16.197.125,27	6,09	15.732.082,67
19	Kalimantan Tengah	8.098.778,66	8.469.705,30	4,58	8.284.241,98
20	Kalimantan Selatan	12.924.755,31	13.880.483,71	7,39	13.402.619,51
21	Kalimantan Timur	16.688.699,93	17.503.627,76	4,88	17.096.163,85
22	Sulawesi Utara	6.711.912,24	7.151.154,41	6,54	6.931.533,33
23	Sulawesi Tengah	9.031.557,86	9.681.220,93	7,19	9.356.389,40
24	Sulawesi Selatan	25.877.600,45	27.475.813,00	6,18	26.676.706,73
25	Sulawesi Tenggara	5.744.438,84	6.053.747,00	5,38	5.899.092,92
26	Gorontalo	1.954.395,45	2.261.415,89	15,71	2.107.905,67
27	Sulawesi Barat	3.004.799,15	3.251.996,25	8,23	3.128.397,70
28	Nusa Tenggara Barat	8.900.281,51	9.321.708,53	4,73	9.110.995,02
29	Nusa Tenggara Timur	10.309.946,83	10.528.600,27	2,12	10.419.273,55
30	Maluku	2.912.806,17	3.037.508,87	4,28	2.975.157,52
31	Maluku Utara	2.212.973,35	2.419.820,21	9,35	2.316.396,78
32	Papua Barat	4.032.812,48	4.292.091,43	6,43	4.162.451,96
33	Papua	14.919.170,43	16.176.947,76	8,43	15.548.059,10
<b>Rata-rata</b>		<b>35.268.700,80</b>	<b>37.469.042,95</b>	<b>6,81</b>	<b>36.368.871,87</b>

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar 2012

**Tabel 3. Perkembangan Investasi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**

No	Propinsi	Tahun 2009 (Juta Rp)	Tahun 2010 (Juta Rp)	Laju Pertum- buhan (%)	Rata-rata
1	Aceh	5.461.787,69	5.679.959,05	3,99	5.570.873,37
2	Sumatera Utara	22.308.844,51	23.413.254,46	4,95	22.861.049,49
3	Sumatera Barat	6.435.873,02	7.161.096,17	11,27	6.798.484,60
4	Riau	25.076.550,00	27.187.628,95	8,42	26.132.089,48
5	Jambi	2.603.276,23	2.792.081,21	7,25	2.697.678,72
6	Sumatera Selatan	13.834.240,00	14.910.858,00	7,78	14.372.549,00
7	Bengkulu	869.534,71	920.708,08	5,89	895.121,40
8	Lampung	5.824.836,34	6.174.633,73	6,01	5.999.735,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.508.058,14	2.639.503,12	5,24	2.573.780,63
10	Kepulauan Riau	10.735.573,98	12.786.282,75	19,10	11.760.928,37
11	DKI Jakarta	125.232.598,97	136.270.559,18	8,81	130.751.579,08
12	Jawa Barat	52.542.970,59	55.629.768,88	5,87	54.086.369,74
13	Jawa Tengah	31.865.319,89	34.411.737,34	7,99	33.138.528,62
14	DI Yogyakarta	5.378.098,83	5.561.444,23	3,41	5.469.771,53
15	Jawa Timur	57.559.552,03	60.170.979,66	4,54	58.865.265,85
16	Banten	12.022.745,30	13.002.865,52	8,15	12.512.805,41
17	Bali	6.062.069,96	7.087.757,28	16,92	6.574.913,62
18	Kalimantan Barat	7.569.318,82	8.035.307,78	6,16	7.802.313,30
19	Kalimantan Tengah	6.712.481,44	7.380.603,91	9,95	7.046.542,68
20	Kalimantan Selatan	4.811.922,94	5.403.666,91	12,30	5.107.794,93
21	Kalimantan Timur	17.881.231,92	18.789.970,01	5,08	18.335.600,97
22	Sulawesi Utara	3.891.903,24	4.024.001,69	3,39	3.957.952,47
23	Sulawesi Tengah	3.158.348,16	3.393.571,32	7,45	3.275.959,74
24	Sulawesi Selatan	9.783.914,13	11.142.660,77	13,89	10.463.287,45
25	Sulawesi Tenggara	3.085.375,13	3.582.762,01	16,12	3.334.068,57
26	Gorontalo	972.055,44	1.022.732,34	5,21	997.393,89
27	Sulawesi Barat	629.893,37	559.329,07	-11,20	594.611,22
28	Nusa Tenggara Barat	5.484.393,67	5.839.279,53	6,47	5.661.836,60
29	Nusa Tenggara Timur	1.658.492,93	1.712.903,54	3,28	1.685.698,24
30	Maluku	164.898,42	191.520,41	16,14	178.209,42
31	Maluku Utara	212.249,22	221.076,86	4,16	216.663,04
32	Papua Barat	1.875.045,94	2.019.927,40	7,73	1.947.486,67
33	Papua	8.428.341,91	9.252.147,73	9,77	8.840.244,82
<b>Rata-rata</b>		14.019.448,39	15.102.199,36	7,62	14.560.823,88

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar 2012

Pada Tabel 3 terlihat bahwa investasi di propinsi-propinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2009-2010. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tinggi rendahnya pendapatan propinsi-propinsi di Indonesia. Dalam hal ini pendapatan dapat menjadi tolok ukur dalam pembentukan modal untuk berinvestasi.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa propinsi Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan investasi terbesar dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang lain yaitu 19,10%, dengan rata-rata laju pertumbuhannya yaitu sebesar 7,62%. Hal ini kemungkinan disebabkan pada tahun 2010 propinsi Kepulauan Riau memiliki pendapatan yang tergolong tinggi sehingga laju pertumbuhan pembentukan modal untuk investasi relatif tinggi.

Tabel 3 juga menunjukkan laju pertumbuhan investasi terendah terdapat di propinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar -11,20% yang terjadi pada tahun 2010. Angka ini berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan yaitu sebesar 7,62%. Hal ini kemungkinan terjadi karena pendapatan di propinsi Sulawesi Barat tergolong rendah. Pendapatan cenderung akan digunakan untuk konsumsi, sehingga pendapatan yang rendah akan menyebabkan bagian pendapatan untuk investasi menjadi sedikit setelah dikurangi dengan konsumsi.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa rata-rata investasi tertinggi yaitu terdapat di propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 130.751.579,08 juta. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pendapatan di Propinsi DKI Jakarta tergolong tinggi dari tahun 2009-2010. Tingginya pendapatan tersebut mengakibatkan tingginya investasi disana. Sedangkan rata-rata investasi terendah yaitu terdapat di propinsi Maluku yaitu sebesar Rp 178.209,42 juta. Hal ini kemungkinan dikarenakan pendapatan yang tergolong rendah.

**Tabel 4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku**

No	Propinsi	Tahun 2009 (Juta Rp)	Tahun 2010 (Juta Rp)	Laju Pertum- buhan (%)	Rata-rata
1	Aceh	18.310.920,78	18.987.062,12	3,69	18.648.991,45
2	Sumatera Utara	24.286.742,22	29.290.407,33	20,60	26.788.574,78
3	Sumatera Barat	9.404.391,49	11.411.965,14	21,35	10.408.178,32
4	Riau	21.902.190,47	25.773.764,25	17,68	23.837.977,36
5	Jambi	7.405.655,89	9.598.119,02	29,61	8.501.887,46
6	Sumatera Selatan	13.622.918,00	15.848.085,00	16,33	14.735.501,50
7	Bengkulu	2.374.767,96	2.811.124,44	18,37	2.592.946,20
8	Lampung	11.217.766,51	12.599.670,94	12,32	11.908.718,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.356.411,75	4.129.616,69	23,04	3.743.014,22
10	Kepulauan Riau	3.744.324,47	4.802.392,10	28,26	4.273.358,29
11	DKI Jakarta	62.642.862,99	80.934.889,51	29,20	71.788.876,25
12	Jawa Barat	58.172.553,50	66.516.281,58	14,34	62.344.417,54
13	Jawa Tengah	48.170.288,56	50.690.617,00	5,23	49.430.452,78
14	DI Yogyakarta	10.789.365,48	11.709.925,02	8,53	11.249.645,25
15	Jawa Timur	53.904.681,70	60.377.521,08	12,01	57.141.101,39
16	Banten	5.973.855,52	6.547.733,17	9,61	6.260.794,35
17	Bali	6.388.695,05	7.712.533,42	20,72	7.050.614,24
18	Kalimantan Barat	9.324.889,04	10.537.261,05	13,00	9.931.075,05
19	Kalimantan Tengah	5.869.412,47	7.034.052,01	19,84	6.451.732,24
20	Kalimantan Selatan	7.696.866,36	9.016.845,32	17,15	8.356.855,84
21	Kalimantan Timur	15.960.189,99	17.889.042,94	12,09	16.924.616,47
22	Sulawesi Utara	9.178.353,93	10.352.837,40	12,80	9.765.595,67
23	Sulawesi Tengah	5.504.528,36	6.136.051,40	11,47	5.820.289,88
24	Sulawesi Selatan	21.779.659,32	32.627.339,98	49,81	27.203.499,65
25	Sulawesi Tenggara	5.622.901,10	6.175.563,00	9,83	5.899.232,05
26	Gorontalo	1.729.066,29	2.175.049,79	25,79	1.952.058,04
27	Sulawesi Barat	2.227.367,16	2.488.649,28	11,73	2.358.008,22
28	Nusa Tenggara Barat	5.739.966,93	7.047.810,47	22,78	6.393.888,70
29	Nusa Tenggara Timur	5.098.845,00	6.167.002,11	20,95	5.632.923,56
30	Maluku	2.157.254,40	2.534.935,68	17,51	2.346.095,04
31	Maluku Utara	1.407.824,64	1.708.373,73	21,35	1.558.099,19
32	Papua Barat	3.738.899,99	4.344.848,15	16,21	4.041.874,07
33	Papua	13.993.682,85	16.337.640,03	16,75	15.165.661,44
<b>Rata-rata</b>		14.506.003,04	17.039.848,79	17,88	15.772.925,91

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar 2012

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2010 pengeluaran pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia cenderung berfluktuasi. Pengeluaran pemerintah yang berfluktuasi dapat dikarenakan perbedaan kebutuhan pembiayaan propinsi-propinsi di Indonesia. Berbagai pembiayaan tersebut digunakan dalam membiayai pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat di propinsi Sulawesi Selatan yaitu 49,81%. Angka ini berada di atas rata-rata laju pertumbuhan di tahun yang sama yaitu 17,88%. Hal ini kemungkinan karena banyaknya pembiayaan, sarana dan prasarana pembangunan di propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dana yang dibutuhkan cenderung banyak.

Tabel 4 terlihat bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah terendah terdapat di propinsi Aceh yaitu 3,69%. Angka ini berada di bawah rata-rata laju pertumbuhannya pada tahun yang sama yaitu 17,88%. Hal ini kemungkinan terjadi karena di propinsi Aceh tidak terlalu banyak membutuhkan pembiayaan, sehingga pengeluaran pemerintah di propinsi tersebut cenderung sedikit.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata pengeluaran tertinggi terdapat di propinsi DKI Jakarta yaitu Rp 71.788.876,25 juta. Angka ini lebih besar dari rata-rata secara keseluruhan yaitu Rp 15.772.925,91 juta. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan sangat diperlukan di propinsi DKI Jakarta, sehingga rata-rata pengeluaran pemerintah cenderung tinggi. Sedangkan propinsi Maluku Utara memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah terendah yaitu Rp 1.558.099,19 juta. Hal ini kemungkinan dikarenakan propinsi Maluku Utara hanya membutuhkan pembiayaan yang relatif sedikit untuk pembiayaan pemerintahan sehingga pengeluaran pemerintah di propinsi tersebut cenderung rendah.

**Tabel 5. Perkembangan Ekspor Netto Propinsi-propinsi di Indonesia  
Tahun 2009-2010 Atas Dasar Harga Berlaku**

No	Propinsi	Tahun 2009 (Juta Rp)	Tahun 2010 (Juta Rp)	Laju Pertum- buhan (%)	Rata-rata
1	Aceh	15.026.071,22	13.734.501,21	-8,60	14.380.286,22
2	Sumatera Utara	21.330.616,21	20.600.285,37	-3,42	20.965.450,79
3	Sumatera Barat	9.128.627,31	11.723.309,79	28,42	10.425.968,55
4	Riau	102.682.528,09	108.849.558,85	6,01	105.766.043,47
5	Jambi	43.802,69	-944.855,00	-2.257,07	-450.526,16
6	Sumatera Selatan	329.773,59	2.028.775,00	515,20	1.179.274,30
7	Bengkulu	2.555.242,67	2.601.290,18	1,80	2.578.266,43
8	Lampung	9.584.332,80	14.975.432,24	56,25	12.279.882,52
9	Kepulauan Bangka Belitung	442.370,93	153.590,21	-65,28	297.980,57
10	Kepulauan Riau	11.074.257,11	7.877.223,76	-28,87	9.475.740,44
11	DKI Jakarta	-8.509.511,00	-14.454.489,00	69,86	-11.482.000,00
12	Jawa Barat	47.952.776,65	58.385.976,55	21,76	53.169.376,60
13	Jawa Tengah	9.731.260,34	19.615.793,24	101,58	14.673.526,79
14	DI Yogyakarta	-6.754.608,00	-7.214.499,00	6,81	-6.984.553,50
15	Jawa Timur	31.207.093,33	22.789.670,85	-26,97	26.998.382,09
16	Banten	24.613.881,32	25.918.513,66	5,30	25.266.197,49
17	Bali	5.322.048,29	1.444.792,04	-72,85	3.383.420,17
18	Kalimantan Barat	-44.462,00	-401.189,00	802,32	-222.825,50
19	Kalimantan Tengah	-3.294.254,00	-3.837.644,00	16,50	-3.565.949,00
20	Kalimantan Selatan	14.091.281,06	12.676.198,33	-10,04	13.383.739,70
21	Kalimantan Timur	188.766.061,66	211.966.062,30	12,29	200.366.061,98
22	Sulawesi Utara	-1.763.632,00	-1.683.598,00	-4,54	-1.723.615,00
23	Sulawesi Tengah	375.042,89	558.931,92	49,03	466.987,41
24	Sulawesi Selatan	2.162.593,35	-3.248.801,00	-250,23	-543.103,83
25	Sulawesi Tenggara	-933.959,00	-1.790.979,00	91,76	-1.362.469,00
26	Gorontalo	-2.406.756,00	-3.107.278,00	29,11	-2.757.017,00
27	Sulawesi Barat	-765.506,00	-786.482,00	2,74	-775.994,00
28	Nusa Tenggara Barat	5.421.648,38	10.321.082,89	90,37	7.871.365,64
29	Nusa Tenggara Timur	-4.201.363,00	-5.551.586,00	32,14	-4.876.474,50
30	Maluku	-777.658,00	-881.135,00	13,31	-829.396,50
31	Maluku Utara	249.892,08	198.504,38	-20,56	224.198,23
32	Papua Barat	-2.688.059,00	-1.230.745,00	-54,21	-1.959.402,00
33	Papua	22.696.092,45	16.272.324,26	-28,30	19.484.208,36
<b>Rata-rata</b>		14.928.712,92	15.683.592,03	-26,62	15.306.152,48

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar (data diolah tahun 2012)

Pada Tabel 5 terlihat bahwa ekspor netto propinsi-propinsi di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh berfluktuasinya produksi di berbagai propinsi di Indonesia. Produksi yang berlimpah akan menyebabkan jumlah ekspor yang tinggi dan kecenderungan impor yang rendah. Akibatnya ekspor netto akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Produksi yang rendah akan menyebabkan ekspor yang rendah dan kecenderungan untuk mengimpor lebih banyak. Akibatnya ekspor netto menjadi rendah.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa Laju pertumbuhan ekspor netto tertinggi terdapat di propinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 802,32%. Angka ini berada di bawah rata-rata yaitu sebesar -26,62%. Hal ini kemungkinan terjadi karena Propinsi Jawa Tengah memiliki hasil produksi yang besar, akibatnya dapat mengekspor produksi lebih banyak daripada impor, sehingga memiliki ekspor netto yang tinggi.

Pada Tabel 5 juga terlihat bahwa laju pertumbuhan ekspor netto terendah juga terdapat di Propinsi Jambi yaitu sebesar -2.257,07%. Angka ini berada jauh dibawah rata-rata laju pertumbuhannya yaitu sebesar -26,62%. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada tahun 2010 Propinsi Jambi sedang mengalami kemerosotan perekonomian, sehingga harus mengimpor barang lebih banyak daripada mengekspor.

Tabel 5 memperlihatkan rata-rata ekspor netto tertinggi terdapat di propinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 200.366.061,98 juta. Hal ini kemungkinan jumlah produksi barang di propinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009-2010 cenderung tinggi, sehingga rata-rata ekspor netto menjadi tinggi. Ini menunjukkan bahwa ekspor di Kalimantan Timur lebih tinggi daripada impor. Sedangkan rata-rata ekspor netto terendah terdapat di propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar Rp -4.876.474,50. Hal ini kemungkinan dikarenakan hasil produksi di propinsi Nusa

Tenggara Timur tidak mencukupi untuk kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga harus mengimpor barang. Ini berarti impor di propinsi Nusa Tenggara Timur lebih besar daripada ekspor.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh yang terjadi antara konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor terhadap pendapatan nasional. Untuk itu penulis mencoba menganalisa tentang perekonomian terbuka dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejuahmana pengaruh konsumsi terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia?
2. Sejuahmana pengaruh investasi terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia?
3. Sejuahmana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia?
4. Sejuahmana pengaruh ekspor netto terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia?
5. Sejuahmana pengaruh secara bersama-sama konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui:

1. Pengaruh konsumsi terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia,

2. Pengaruh investasi terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia,
3. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia,
4. Pengaruh ekspor netto terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia,
5. Pengaruh secara bersama-sama konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

#### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai bahan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu terutama ilmu Ekonomi Pembangunan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan peneliti.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan implikasi kebijakan berdasarkan penelitian empiris atas fenomena yang ada bagi pembuat kebijakan, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi-propinsi di Indonesia dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi-propinsi di Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Perekonomian Terbuka**

Pada perekonomian tertutup, semua aktivitas ekonomi tidak berhubungan dengan aktivitas ekonomi negara lain. Sementara itu, pada perekonomian terbuka, aktivitas ekonomi suatu Negara berhubungan dengan aktivitas ekonomi negara lain. Hubungan aktivitas ekonomi suatu Negara dengan Negara lain akan membentuk sistem ekonomi internasional (Ritonga, 2006:84).

Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan ekonomi-ekonomi lain di seluruh dunia. Perekonomian terbuka berinteraksi dengan perekonomian-perekonomian lainnya dengan dua cara yaitu membeli dan menjual barang dan jasa dalam berbagai produk-produk dunia, serta jual-beli modal/aset dalam pasar uang internasional.

Menurut Sukirno (2004:201), dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, perekonomian dapat dibedakan kepada empat sektor, yaitu ditambah dengan sektor luar negeri, dimana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Analisis penentuan pendapatan nasional seperti itu dinamakan sebagai keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi empat sektor atau

perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor.

Masih menurut Sukirno (2004:8), dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga,
- b. Investasi perusahaan-perusahaan,
- c. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah,
- d. Ekspor (pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk Negara-negara lain).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat komponen dalam perekonomian terbuka. Dalam sebuah Negara, terdapat empat komponen dalam perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah. Namun dalam perekonomian terbuka, selain ketiga komponen tersebut terdapat komponen baru yaitu ekspor dan impor.

Dengan demikian komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah pengeluaran rumah tangga atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran atas barang impor dan pengeluaran orang luar negeri atas barang buatan dalam negeri (ekspor). Oleh karena itu, menurut Sukirno (2004:205), pengeluaran agregat tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan formula berikut :

$$AE = C_{dn} + I + G + X - M \quad (1)$$

Dimana :

AE = *aggregate expenditure/aggregate demand*

$C_{dn}$	= konsumsi atas barang dan jasa dalam negeri
$I$	= investasi
$G$	= pengeluaran pemerintah
$X$	= ekspor
$M$	= impor

Teori pertumbuhan Keynes dalam Mankiw (2003:112), terdapat empat komponen dalam pengeluaran atas output ( $Y$ ) pada perekonomian terbuka, yaitu :

- $C^d$ , yaitu konsumsi barang dan jasa domestik
- $I^d$ , yaitu investasi dalam barang dan jasa domestik
- $G^d$ , yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa domestik
- $EX$ , ekspor barang dan jasa domestik

Pembagian dalam pengeluaran menjadi empat komponen tersebut ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = C^d + I^d + G^d + EX \dots\dots\dots (2)$$

Jumlah dari tiga komponen pertama,  $C^d + I^d + G^d$  adalah pengeluaran domestik atas barang dan jasa domestik. Sedangkan komponen keempat,  $EX$ , adalah pengeluaran luar negeri atas barang dan jasa domestik.

Pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran domestik untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Karena itu, konsumsi total ( $C$ ) sama dengan ( $C^d$ ) ditambah konsumsi barang dan jasa mancanegara ( $C^f$ ), investasi total ( $I$ ) sama dengan investasi dalam barang dan jasa domestik ( $I^d$ ) ditambah investasi dalam barang dan jasa mancanegara ( $I^f$ ), dan belanja pemerintah total ( $G$ ) sama dengan belanja pemerintah atas barang dan jasa domestik ( $G^d$ ) ditambah

belanja pemerintah atas barang dan jasa mancanegara ( $G^f$ ). Dengan demikian, akan diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$C = C^d + C^f \dots\dots\dots (3)$$

$$I = I^d + I^f \dots\dots\dots (4)$$

$$G = G^d + G^f \dots\dots\dots (5)$$

Dimana :

$C^f$  = konsumsi barang dan jasa mancanegara

$I^f$  = investasi dalam barang dan jasa mancanegara

$G^f$  = pembelian pemerintah atas barang dan jasa mancanegara

Persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan (2), sehingga :

$$Y = (C - C^f) + (I - I^f) + (G - G^f) + EX \dots\dots\dots (6)$$

Persamaan tersebut dapat diubah menjadi :

$$Y = C + I + G + EX - (C^f + I^f + G^f) \dots\dots\dots (7)$$

Jumlah pengeluaran domestik atas barang dan jasa mancanegara ( $C^f + I^f + G^f$ )

adalah pengeluaran untuk impor (IM). Jadi akan diperoleh persamaan

pendapatan nasional sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + EX - IM \dots\dots\dots (8)$$

Karena pengeluaran untuk impor dimasukkan dalam pengeluaran domestik ( $C + I + G$ ), dan karena barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri bukanlah bagian dari output suatu Negara, maka persamaan ini harus dikurangi pengeluaran untuk impor. Ekspor dikurangi impor dapat didefinisikan sebagai ekspor neto ( $NX = EX - IM$ ). Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + NX \dots\dots\dots (9)$$

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam permintaan agregat memiliki beberapa komponen yang mempengaruhinya, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Pada suatu daerah regional, penghitungan pendapatan dihitung berdasarkan produk domestic regional bruto (PDRB). Menurut Supriyanto dan Ali (2009:157), produk domestik regional bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah (propinsi) selama 1 (satu) tahun.

Ervin mengatakan pengertian PDRB sebagai penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten /kota), dan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa, (<http://bunawolo.wordpress.com>).

Masih menurut Ervin, dalam suatu proses produksi selama satu tahun, seluruh nilai harga produsen barang/jasa yang diproduksi dinamakan output. Secara teknis penghitungan ini adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga atau tarip jual dari produsen barang atau jasa tersebut.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa produk domestik regional bruto merupakan jumlah keseluruhan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian

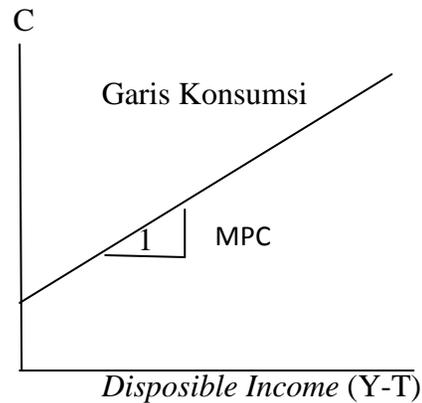
### a. Pengaruh Konsumsi terhadap Perekonomian

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu mengkonsumsi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam analisis makroekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga (Sukirno, 2004:38).

Dalam suatu perekonomian konsumsi merupakan salah satu komponen yang selalu hadir melengkapi persamaan identitas dalam perhitungan pendapatan nasional. Keynes dalam Sukirno (2004:7) berpendapat bahwa pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu Negara. Perubahan dalam konsumsi mampu mempengaruhi perekonomian suatu negara karena konsumsi adalah satu komponen pengeluaran. Konsumsi yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan juga tinggi. Selain itu konsumsi juga memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan pendapatan. Dimana jika pendapatan nasional meningkat maka pengeluaran untuk mengkonsumsi juga meningkat.

Pendapatan yang diterima rumah tangga sama dengan output perekonomian ( $Y$ ). Kemudian pemerintah menarik pajak dari rumah

rumah tangga sejumlah  $T$ . Sehingga persamaan setelah pajak  $Y-T$ , sebagai pendapatan disposibel (*disposable income*) atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Hal ini sesuai dengan gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 1 : Fungsi Konsumsi**

*Sumber : Mankiw (2003:52)*

Konsumsi bergantung secara langsung pada tingkat *disposable income* atau pendapatan disposibel, sehingga semakin tinggi pendapatan disposibel, semakin tinggi konsumsi. Jadi,

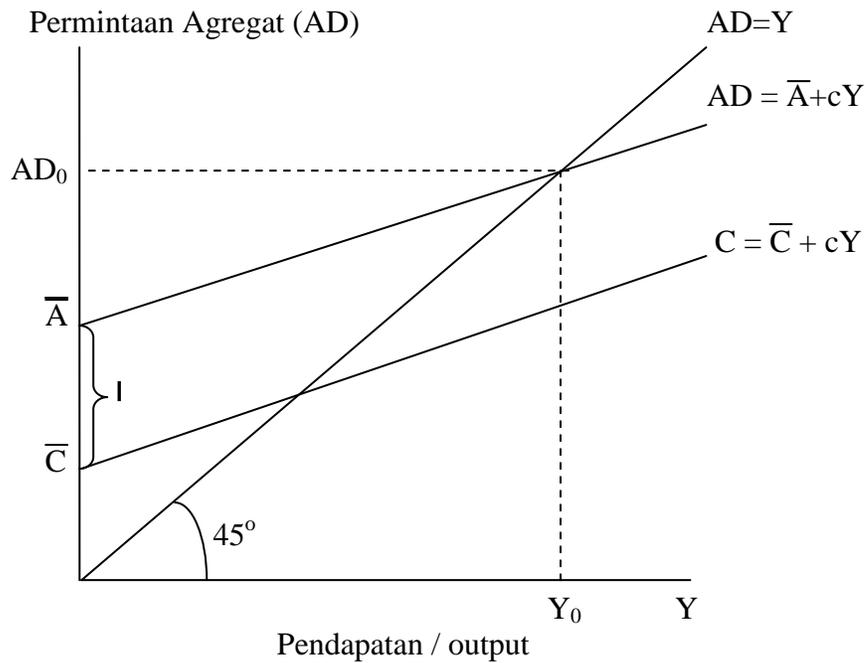
$$C = C(Y-T) \quad \dots\dots\dots (9)$$

Dimana:

- C = konsumsi
- Y = pendapatan
- T = pajak

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi rumah tangga tergantung pendapatan yang diterimanya setelah dikurangi pajak. Artinya, pendapatan baru dapat dibelanjakan setelah dikurangi oleh pajak.

Dornbusch (2008:194) menyatakan bahwa permintaan barang konsumsi tidak konstan, melainkan naik bersamaan dengan naiknya pendapatan. Artinya, keluarga berpendapatan lebih tinggi akan mengkonsumsi lebih banyak dari keluarga dengan pendapatan rendah. Begitu pula terhadap suatu Negara. Negara dengan pendapatan tinggi umumnya memiliki tingkat total konsumsi yang tinggi pula. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan digambarkan dalam fungsi konsumsi (*consumption function*).



**Gambar 2 : Fungsi Konsumsi dan Keseimbangan Agregat**  
 Sumber : Dornbusch (2008:195)

Gambar 2 diasumsikan permintaan konsumsi naik bersamaan dengan tingkat pendapatan, sehingga :

$$C > 0 ; \bar{0} < c < 1 \dots\dots\dots (10)$$

Persamaan 3.0 ini ditunjukkan oleh garis  $C = \bar{C} + cY$  pada gambar 2. Variabel  $\bar{C}$  merupakan tingkat konsumsi ketika pendapatan nol. Setiap dollar kenaikan pendapatan, konsumsi akan naik sebesar \$c. *Slope* dari fungsi konsumsi adalah  $c$ . Sepanjang fungsi konsumsi, tingkat konsumsi naik bersamaan dengan pendapatan.

Koefisien  $c$  yang diperlihatkan dari gambar 2 merupakan kecenderungan marginal untuk berkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume – MPC*). *marginal propensity to consume* adalah kenaikan konsumsi dari setiap unit kenaikan pendapatan (Dornbusch, 2008:194). Dalam contoh gambar 2, *marginal propensity to consume* kurang dari 1, yang berarti bahwa dari sejumlah kenaikan pendapatan, hanya sebagian saja yang digunakan untuk konsumsi.

Berdasarkan gambar 2, permintaan konsumsi individu berhubungan dengan jumlah pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan, yaitu *disposable income* (DY). Selain itu, fungsi konsumsi  $C = \bar{C} + cY$  mengabaikan peran pemerintah dan perdagangan luar negeri. Dari fungsi konsumsi tersebut juga memperlihatkan bahwa peran riil intersep ialah sebagai factor yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan. Misalnya kepemilikan asset, saham, obligasi, dan rumah.

Sukirno (2003:158) menyatakan, jika pendapatan tidak mengalami perubahan kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil menjadi sedikit, jadi kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-

barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan rumah tangga mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya. Termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga dari satu barang menyebabkan pendapatan riil bertambah, hal ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konsumsi masyarakat, menandakan semakin tinggi pendapatan nasional sehingga semakin tinggi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian juga tercapai.

Menurut Keynes hubungan konsumsi disebut fungsi konsumsi, secara matematis dapat ditulis :

$$C = a + bY \quad (11)$$

Dimana:

- c = konsumsi
- a = parameter yang menunjukkan konsumsi jika  $Y = 0$
- b = parameter yang menunjukkan pertambahan konsumsi ( $\Delta C$ ) akibat adanya tambahan pendapatan ( $\Delta Y$ )
- Y = pendapatan nasional

Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume*) yang disingkat dengan MPC yaitu perbandingan antara rasio tambahan dalam konsumsi ( $\Delta C$ ) dengan tambahan dari pendapatan ( $\Delta Y$ ).

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \dots\dots\dots(12)$$

Jadi perekonomian suatu negara dapat dipacu melalui pengeluaran konsumsi masyarakat, dimana dengan semakin tinggi pendapatan maka konsumsi akan bertambah. Hal ini akan menambah pengeluaran yang nantinya akan meningkatkan PDRB.

b. Pengaruh Investasi terhadap *Agregate Demand*

Secara umum kata investasi dikenal dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Dalam ilmu ekonomi makro investasi berarti penambahan stock modal fisik. Investasi meliputi konstruksi perumahan, pembelian mesin-mesin, pembangunan pabrik-pabrik dan kantor, serta tambahan *inventory* (perlengkapan) barang perusahaan (Dornbusch, 2008:342).

Menurut Sukirno (2006:86), penanaman modal oleh para pengusaha ditentukan oleh dua faktor yaitu efisiensi marjinal modal dan suku bunga. Efisiensi marjinal modal menggambarkan tingkat pengembalian modal yang akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan dalam perekonomian. Apakah seorang pengusaha akan menanam modal atau membatalkannyatergantung kepada sifat hubungan diantara efisiensi modal marjinal dengan suku bunga. Jika suku bunga lebih tinggi dari efiriensi marjinal dari investasi itu, maka pengusaha itu akan membatalkan rencana untuk menanam

modal. Seorang pengusaha baru akan menanam modal jika hasil dari investasinya lebih tinggi dari suku bunga.

Menurut mankiw (2003:52), jumlah barang-barang modal yang diminta bergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Agar proyek investasi menguntungkan, hasilnya harus melebihi biayanya. Jika suku bunga meningkat, lebih sedikit proyek investasi yang menguntungkan, dan jumlah barang-barang investasi yang diminta akan turun.

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$I = I(r) \dots\dots\dots (13)$$

Dimana:

- I = Investasi
- R = suku bunga

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi yang dilakukan adalah tergantung oleh suku bunga. Dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah investasi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suku bunga, maka semakin tinggi investasi.

Investasi merupakan salah satu dari determinan terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yang pada hakikatnya juga merupakan langkah awal bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi akan menambah sumber daya produktif suatu negara, investasi juga sering merupakan satu-satunya cara bagi teknologi baru yang produktif untuk meningkatkan kinerja ekonomi, karena investasi harus dibiayai dengan tabungan suatu

negara, melalui efeknya pada investasi dapat menimbulkan pengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2004:97).

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perekonomian negara yang baik yaitu dengan menambah investasi, karena salah satu dari determinan terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yang pada hakikatnya juga merupakan langkah awal bagi kegiatan pembangunan ekonomi dan investasi juga sering merupakan satu-satunya cara bagi teknologi baru yang produktif untuk meningkatkan kinerja ekonomi.

Menurut Sukirno (2003:107), investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi. Untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selain itu Sukirno (2000:376) mengemukakan bahwa investasi merupakan komponen pengeluaran agregat, maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.

Jadi, investasi merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga jika investasi meningkat maka pertumbuhan perekonomian juga mengalami peningkatan. Dengan kata lain besarnya

pertumbuhan perekonomian yang dicapai ditentukan juga oleh besarnya investasi yang dilakukan.

Investasi dalam praktiknya meliputi tiga komponen dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, meliputi pengeluaran atau perbelanjaan sebagai berikut (Sukirno, 2000:122) :

- 1) Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- 2) Perbelanjaan untuk perumahan, bangunan kantor, pabrik dan lainnya.
- 3) Pertumbuhan nilai *stock* barang-barang yang belum terjual.

Jadi, investasi atau penanaman modal merupakan bagian dari sektor pembangunan yang tidak bisa diabaikan, yang dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa datang. Pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber daya investasi, guna mencapai laju pertumbuhan perekonomian.

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Perekonomian

Sukirno (2004:168), menyatakan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di Negara-negara yang sudah maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan

sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Masih menurut Sukirno (2004:168), membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai system pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai oleh pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu Negara.

Sedangkan menurut Supriyanto (2009:162), pengeluaran pemerintah terdiri dari :

- 1) Pengeluaran konsumsi pemerintah, misalnya pembayaran gaji pegawai dan pembelian alat-alat kantor,
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk investasi, misalnya pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, pelabuhan dan lain-lain.

Masih menurut Supriyanto (2009:162), menyatakan bahwa pengeluaran investasi pemerintah maupun swasta nantinya oleh pemerintah dimasukkan dalam komponen pembentukan modal tetap domestik bruto dan komponen perubahan stok yang diistilahkan *government expenditure (G)*.

Setiap pengeluaran yang dilakukan berimplikasi pada penerimaan pendapatan yang lebih besar. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, pembelian pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan.

Adanya pergerakan keseimbangan yang diciptakan oleh pembelian atau pengeluaran pemerintah dari satu titik keseimbangan kepada titik keseimbangan yang lainnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat turut meningkatkan pendapatan keseimbangan suatu negara. Alasannya adalah bahwa menurut fungsi konsumsi  $C = C(Y-t)$ , pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan dalam pembelian pemerintah meningkatkan pendapatan, ia juga meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan yang kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Oleh sebab itu kenaikan dalam pembelian dan pengeluaran pemerintah menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar (Mankiw, 2003:245).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk belanja pegawai maupun pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan

jembatan, maka pertumbuhan perekonomian juga akan mengalami peningkatan.

d. Pengaruh Ekspor Netto terhadap Perekonomian

Menurut Ritonga (2007:84), perdagangan internasional yang dilakukan dalam perekonomian terbuka memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu Negara. Melalui perdagangan internasional, setiap Negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup memproduksi barang yang paling efisien dibanding negara lain. Perdagangan internasional juga memungkinkan rakyat negara tersebut memperoleh barang konsumsi yang tidak ada di negara mereka.

Selain itu, Ritonga (2007:84) juga menyatakan bahwa perdagangan internasional juga memungkinkan timbulnya persaingan kearah positif. Misalnya dapat meningkatkan kemajuan teknologi produksi. Sementara itu *spesialisasi* oleh masing-masing negara akan diusahakan untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga mereka bisa unggul dari negara lain.

Menurut Case and Fair (2004:381) menyatakan bahwa ekspor netto barang dan jasa adalah perbedaan antara ekspor total dan impor total sebuah Negara. Ekspor netto merupakan sumber pendapatan suatu Negara. Ini dapat dijelaskan apabila total ekspor suatu Negara yang lebih besar daripada total impor di negara tersebut. Sumber pendapatan yang

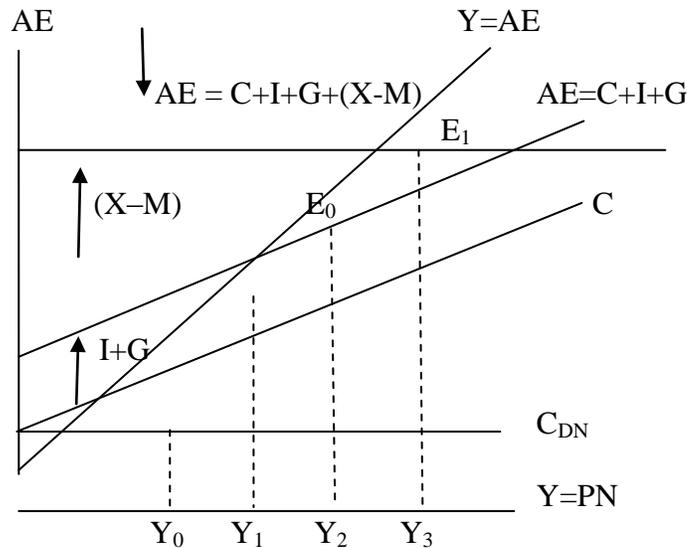
tinggi turut dapat membiayai kegiatan proses produksi di dalam negeri sehingga output yang dihasilkan lebih meningkat dan mendorong kinerja perdagangan suatu Negara.

Dalam perekonomian terbuka adanya interaksi perdagangan internasional yang dilakukan antar Negara-negara. Bentuk perdagangan tersebut adalah kegiatan ekspor dan impor. Dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri, impor adalah segenap barang dan jasa yang dibuat di luar negeri untuk kemudian dijual ke dalam negeri (Mankiw, 2003:315).

Melalui proses ekspor, sumber daya dari kedua Negara dapat digunakan dengan cara paling efisien. Output kedua komoditi yang diproduksi akan meningkat. Peningkatan dalam output ini akan mengukur keuntungan dari spesialisasi produk-produk untuk kedua negara yang melakukan perdagangan.

Impor merupakan kelebihan dari pendapatan karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri. Oleh karena itu maka sebagian dari pendapatan nasional maupun daerah akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dari tujuan untuk melakukan perdagangan internasional, maka suatu negara akan melakukan impor barang dan jasa dari luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dihasilkan atau jika dihasilkan di dalam negeri akan memakan biaya yang relatif besar. Keanekaragaman kondisi

produksi inilah salah satu faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional (Ritonga, 2007:85).



**Gambar 3 : Keseimbangan Pendapatan Nasional dalam Perekonomian Terbuka**

*Sumber : Sukirno (2003:212)*

Gambar 3 menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Di dalam perekonomian terbuka akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Perekonomian agregat akan bertambah sebanyak ekspor netto  $(X-M)$ . Keseimbangan pendapatan nasional pindah dari  $E_0$  menjadi  $E_1$  dan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari  $Y_2$  menjadi  $Y_3$ . Maka impor nilainya sebanding dengan pendapatan nasional, dengan fungsi  $AE = C + I + G + (X - M)$  lebih landai (Sukirno, 2003:212).

Pembelian barang ke luar negeri akan dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka pembiayaan impor akan dibayar dengan cadangan valuta asing yang dimiliki suatu Negara yang diperoleh dari ekspor negara tersebut. Impor yang dilakukan secara berlebihan akan mempengaruhi neraca pembayaran suatu Negara dan terjadinya defisit pada neraca pembayaran dan neraca perdagangan.

Menurut Sukirno (2000:110) impor perlu dipertimbangkan dalam menentukan pembelanjaan agregat terhadap barang-barang dalam negeri karena barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri mengandung barang-barang impor. Oleh sebab itu, untuk menghitung pembelanjaan agregat atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri impor harus dikurangkan dari keseluruhan perbelanjaan agregat yang dilakukan oleh suatu Negara. Karena dalam pembelanjaan agregat ini termasuk impor, maka pembelanjaan agregat =  $C+I+G+(X-M)$ . Penentuan impor suatu Negara yang utama adalah pendapatan masyarakat suatu Negara. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak impor yang mereka lakukan (Sukirno, 2000:14).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ekspor netto adalah nilai dari selisih antara total ekspor dikurangi dengan total impor suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional pada kurun waktu tertentu. Dalam hal ini ekspor netto sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu perekonomian.

## B. Temuan Penelitian Sejenis

Penelitian yang serupa diperlukan untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan. Agar dapat dilihat dan diketahui apakah penelitian yang dilakukan ini sangat berpengaruh dan mendukung atau tidak dengan penelitian sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Dewi Setiowati (2010:114).

Penelitian ini mengemukakan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional di Indonesia, artinya semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga, semakin tinggi pula pendapatan nasional.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional di Indonesia, artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka semakin tinggi pula pendapatan nasional.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pendapatan nasional, hal ini menunjukkan semakin banyak penanaman modal yang digunakan, maka semakin besar pula jumlah pendapatan nasional.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara ekspor neto terhadap pendapatan nasional, artinya semakin tinggi ekspor netto, semakin tinggi pula pendapatan nasional.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis data yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis data *time series* (berdasarkan runtut waktu). Sedangkan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data berdasarkan runtut waktu dan berdasarkan beberapa tempat (*crossing*).

Selain itu, perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dan waktu penelitian.

Selain itu penelitian Haryadi (2009:12) pada kesimpulannya dalam sebuah artikel mengemukakan bahwa dalam kajian empiris menunjukkan variabel ekspor dan pengeluaran pemerintah (non investasi) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi ekspor, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu pengeluaran pemerintah juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Desi (2010:136) pada kesimpulannya mengemukakan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi, sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak signifikan berpengaruh.

Penelitian sejenis yang lain dilakukan oleh Jamzani (2007:34) pada kesimpulannya mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah, keterbukaan ekonomi (*ekspor netto*), dan angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep yang menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antar variabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Keterkaitan maupun hubungan antar variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori di atas.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Adapun variabel yang akan dibahas adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor dan pendapatan nasional. Konsumsi berpengaruh positif terhadap perekonomian, artinya semakin besar konsumsi, maka semakin besar pula pertumbuhan perekonomian. Begitu juga sebaliknya, jika konsumsi menurun maka pertumbuhan perekonomian juga akan menurun.

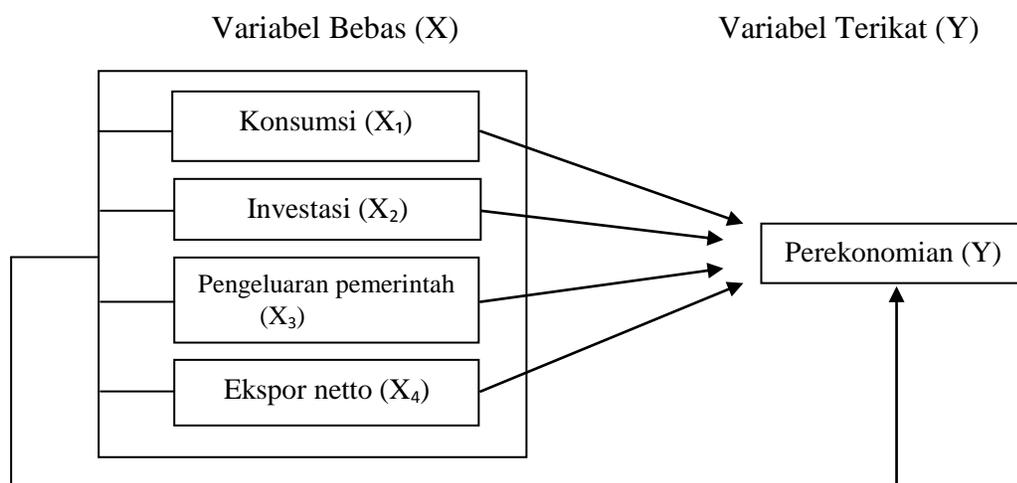
Begitu pula dengan investasi. Investasi berpengaruh positif terhadap perekonomian, artinya semakin tinggi investasi di dalam dan luar negeri, semakin tinggi pula pertumbuhan perekonomian, dan sebaliknya semakin rendah investasi, maka akan semakin rendah pula pertumbuhan perekonomian. Ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya modal atau sumber anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Pengeluaran pemerintah Indonesia yang meningkat secara langsung juga dapat mendorong peningkatan terhadap nilai PDRB dalam negeri. Jumlah anggaran pembangunan yang besar menyebabkan proses pembangunan

infrastruktur nasional tercapai. Kemungkinan ini akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian yang dicapai akan meningkat.

Variabel ekspor netto juga berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) propinsi-propinsi di Indonesia. Jika ekspor netto meningkat maka akan menyebabkan peningkatan terhadap PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika ekspor netto menurun maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini kemungkinan dikarenakan bertambahnya sumber pendapatan Negara melalui kegiatan perdagangan internasional ekspor antara Indonesia dengan Negara-negara lain.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema/bagan konseptual sebagai berikut:



**Gambar 4: Pengaruh Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor Netto terhadap Perekonomian Propinsi-propinsi di Indonesia.**

#### D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

4. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara ekspor netto terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto secara bersama-sama terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta_i \neq 0$$

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsumsi berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000$ ) dengan tingkat pengaruh secara parsial sebesar 1.0537 satuan, artinya jika konsumsi meningkat satu satuan maka akan meningkatkan perekonomian sebesar 1.0537 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*.
2. Jumlah investasi berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000$ ) dengan tingkat pengaruh secara parsial sebesar 0.8961 satuan, artinya jika konsumsi meningkat satu satuan maka akan meningkatkan perekonomian sebesar 0.8961 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000$ ) dengan tingkat pengaruh secara parsial 1.3415 satuan. Artinya jika pengeluaran pemerintah ditingkatkan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi besarnya perekonomian provinsi-provinsi di Indonesia yaitu meningkatnya perekonomian sebesar 1.3415 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*.

4. Jumlah ekspor netto berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000$ ) dengan tingkat pengaruh secara parsial sebesar 0.9935 satuan, artinya jika konsumsi meningkat satu persen maka akan meningkatkan perekonomian sebesar 0.9935 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*.
5. Secara bersama-sama konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia ( $\text{sig} = 0,0000$ ) artinya semakin tinggi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto maka cenderung semakin tinggi pula perekonomian. Begitu juga sebaliknya, jika konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto mengalami penurunan maka perekonomian juga mengalami penurunan. Sumbangan secara bersama-sama keempat variabel bebas dalam penelitian ini terhadap perekonomian adalah sebesar 99,52 persen dan sisanya sebesar 0,48 persen terdapat di luar variabel bebas yang diteliti.

## **B. Saran**

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja dan menaikkan penyerapan tenaga kerja sehingga orang-orang yang belum memiliki penghasilan dapat berpenghasilan dan mendorong naiknya konsumsi rumah tangga. Cara lain

menaikkan konsumsi adalah menaikkan upah lewat menaikkan kemampuan Individu melalui pendidikan. Pendidikan yang tinggi mempengaruhi upah yang diterima, dan upah yang tinggi mempengaruhi konsumsi yang tinggi pula. Dengan demikian pendapatan nasional akan meningkat dan meningkatkan perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.

2. Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Misalnya pembangunan jalan dan pembangunan tempat-tempat pariwisata, sehingga akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Dengan tingginya investasi maka akan meningkatkan pajak yang akan diterima oleh pemerintah, sehingga pendapatan yang diterima oleh pemerintah menjadi bertambah dan perekonomian akan berada dalam kondisi yang lebih baik.
3. Meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan gaji pegawai. Peningkatan gaji pegawai dapat meningkatkan pajak yang merupakan pendapatan bagi pemerintah. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia.
4. Meningkatkan jumlah produksi dalam negeri sehingga dengan menambah produksi dalam negeri maka ekspor netto dapat ditingkatkan. Peningkatan ekspor netto akan menambah jumlah devisa negara, sehingga perekonomian dapat ditingkatkan dengan adanya peningkatan ekspor netto

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2004. *Statistika I Buku Ajar*. Fakultas Ekonomi UNP : Padang.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2011*. BPS : Jakarta.
- Bastias, Desi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang (<http://ebookbrowse.com/gdoc>, diakses tanggal 4 Januari 2013).
- Bunawolo, Ervin Noderius Mei. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto*. Artikel. Jakarta (<http://bunawolo.wordpress.com/pdrb/>, diakses tanggal 2 Februari 2013)
- Case, Karl E. dan Ray C.Fair. 2004. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro Edisi-5*. Indeks Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 2008. *Makro Ekonomi*. Erlangga : Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Erlangga : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jilid 2. Erlangga : Jakarta.
- Haryadi. 2009. *Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Guncangan Struktural Kebijakan Makroekonomi Indonesia: Suatu Analisis Business Cycle dari Sisi Permintaan*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi : Jambi ([www.jurnal.pdii.lipi.go.id](http://www.jurnal.pdii.lipi.go.id), diakses tanggal 8 Oktober 2012).
- Idris. 2008. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS*. Fakultas Ekonomi UNP : Padang.
- Jhingan M.L.2004. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Rajawali Persada : Jakarta.
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Makroekonomi edisi keenam*. Erlangga : Jakarta.